



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 3 TAHUN 2025





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpun : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN III

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara Perdara yang diselesaikan tepat waktu.	95%							111	107	96,40%			101,47%
		Presentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100%							137,00	137,00	100,00%			100,00%
		Presentase perkara Perdara Khusus PHI yang diselesaikan tepat waktu.	25%							6,00	0,00	0,00%			0,00%
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)	N/A							0,00	0,00	0,00			N/A
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	85%							254,00	222,00	87,40%			102,83%
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	85%							254,00	232,00	91,34%			107,46%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpun : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator: Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	111	96,40%	101,47%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator: Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	137	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator: Presentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	25%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara Perdata Khusus PHI belum melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara Perdata Khusus PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
- b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (RJ)	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang didaftarkan/diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) pada Triwulan 3 Tahun 2025 ini, sehingga capaian kinerja N/A.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	254	87,40%	102,83%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	254	91,34%	107,46%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu, e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

Anggaran untuk kegiatan ini:

- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				100%	1	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa perkara Anak yang diselesaikan/didaftarkan secara Diversi, capaian kinerjanya telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

- Anggaran untuk kegiatan ini:
- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				100%	232	96,71%	96,71%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SISUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	111	100,00%	105,26%
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	137	100,00%	105,26%
3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus PHI yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	6	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		1,50%	19	5,26%	350,88%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
- c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%	2	50,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwaperkara yang diajukan dan diselesaikan secara prodeo telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
- e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025 N/A.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	24	100,00%	100,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah mencapai target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	40%	7	28,57%	71,43%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah melebihi target untuk periode Triwulan 3 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (Perkusi);
- b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN 3
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - Perdata Khusus PHI	95% 100% 25%	96,40% 100% 0%	101,47% 100% 0%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;	85%	87,40%	102,83%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;	85%	91,34%	107,46%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;	100%	100%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;	100%	96,71%	96,71%

AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		b. Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		c. Presentase salinan putusan perkara perdata khusus phi yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		d. Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1,50%	5,26%	350,88%

AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Memberikan Layanan secara Elektronik		Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	50% N/A 100%	50% N/A 100%	100% N/A 100%

AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sosialisasi Eksternal	Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan
Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.		

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%	28,57%	71,43%

AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Memberikan Layanan secara Elektronik	Meningkatkan dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi; Komitmen Pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan



Mengetahui,
RUFIA

ACHMAD RUFIA, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

Gresik, 17 November 2025

Dibuat oleh,
PLH. KEPALA SUB BAG PTIP



MAZHRUR R. K. WARDANI, S.Kom.
NIP. 199208122019031006



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 2 TAHUN 2025





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telp : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN II

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara Perdara yang diselesaikan tepat waktu.	80%				109	103	94,50%	118,12%					
		Presentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90%				127	127	100,00%	111,11%					
		Presentase perkara Perdara Khusus PHI yang diselesaikan tepat waktu.	90%				0	0	0,00%	0,00%					
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)	5%				0	0	0,00%	0,00%					
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	60%				236	217	91,95%	153,25%					
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	55%				236	209	88,56%	161,02%					

[illegible]

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator: Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	109	94,50%	118,12%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator: Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	127	100,00%	111,11%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator: Presentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara Perdata Khusus PHI telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara Perdata Khusus PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
- b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (RJ)	5%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang didaftarkan/diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) pada Triwulan 2 Tahun 2025 ini, sehingga capaian kinerja masih 0%.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	236	91,95%	153,25%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%	236	88,56%	161,02%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu, e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

Anggaran untuk kegiatan ini:

- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO		TARGET	INPUT	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara Anak yang diselesaikan/didaftarkan secara Diversi, sehingga capaian kinerja belum mencapai target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/ISP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

Anggaran untuk kegiatan ini:

- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO		TARGET	INPUT	CAPAIAN
1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	154	111,11%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SISUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95%	109	100,00%	105,26%
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95%	127	100,00%	105,26%
3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus PHI yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah melampaui target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/ISP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				5%	18	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian belum mencapai target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
- c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/pengugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan

Indikator: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				50%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan secara prodeo sehingga target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025 belum tercapai.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
- e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025 belum tercapai.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	23	100,00%	100,00%
----	--	------	----	---------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah mencapai target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	20%	1	200,00%	1000,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah melebihi target untuk periode Triwulan 2 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (Perkusi);
- b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN 2

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - Perdata Khusus PHI	80% 90% 90%	94,50% 100% 0%	118,12% 111,11% 0%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;	5%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;	60%	91,95%	153,25%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;	55%	88,56%	161,02%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;	90%	100,00%	111,11%

	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		b. Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		c. Presentase salinan putusan perkara perdata khusus phi yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	0%	0,00%
		d. Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	0%	0%

AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Memberikan Layanan secara Elektronik		Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan
SASARAN		INDIKATOR		CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;		0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.		0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).		100%
AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Sosialisasi Eksternal	Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan
	Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.		
SASARAN		INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%	1000,00%
AKSI / KEGIATAN		URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Meningkatkan dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi;	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan
		Komitmen Pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata.		



Mengetahui,
SEKRETARIS

IBNU SOLA, S.H., M.M.
NIP. 196709071993031001

Gresik, 2 Juli 2025

Dibuat oleh,
KEPALA SUB BAG PTIP

ADELIA FEBRIANTI, S.Sos.
NIP. 199302182019032010



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN 1 TAHUN 2025



pn-gresik.go.id



Pengadilan Negeri Gresik



@pengadilannegerigresik



pengadilannegerigresik



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp208.157.000,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025
TRIWULAN I

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja TW 1			Realisasi Kinerja TW 2			Realisasi Kinerja TW 3			Realisasi Kinerja TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian TW 1	Input	Realisasi	Capaian TW 2	Input	Realisasi	Capaian TW 3	Input	Realisasi	Capaian TW 4
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara Perdara yang diselesaikan tepat waktu.	80%	124	122	98,39%	122	122,98%							
		Presentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90%	138	138	100,00%		111,11%							
		Presentase perkara Perdara Khusus PHI yang diselesaikan tepat waktu.	90%	6	2	33,33%		66,67%							
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (R)	5%	0	0	0,00%		0,00%							
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	60%	268	227	84,70%		141,17%							
		Prosentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	55%	268	234	87,31%		158,75%							

[illegible]

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator: Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	124	98,39%	122,98%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain: Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga hambatan yang menunjang kegagalan belum teridentifikasi.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator: Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	138	100,00%	111,11%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator: Presentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA				
NO	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata Khusus PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	6	33,33%	66,67%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara Perdata Khusus PHI telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara Perdata Khusus PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (RJ)	5%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang didaftarkan/diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini, sehingga capaian kinerja masih 0%.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	268	84,70%	141,17%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%	268	87,31%	158,75%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu, e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

Anggaran untuk kegiatan ini:

- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara Anak yang diselesaikan/didaftarkan secara Diversi, sehingga capaian kinerja belum mencapai target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSPP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

Anggaran untuk kegiatan ini:

- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	153	99,98%	111,09%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SISUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	124	100,00%	105,26%
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	138	100,00%	105,26%
3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus PHI yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		95%	6	100,00%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah melampaui target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/ISP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				5%	27	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian belum mencapai target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
- c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/pengugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				50%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan secara prodeo sehingga target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 belum tercapai.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
- e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator: Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0,00%	0,00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025 belum tercapai.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	37	100,00%	100,00%
----	--	------	----	---------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah mencapai target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran:

- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	20%	14	35,71%	178,57%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja telah melebihi target untuk periode Triwulan 1 Tahun 2025. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain:

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (Perkusi);
- b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - Perdata Khusus PHI	80% 90% 90%	98,39% 100% 33,33%	122,98% 111,11% 66,67%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;	5%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;	60%	84,70%	141,17%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;	55%	87,31%	158,75%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;	90%	99,98%	111,09%
	AKSI / KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
	Memberikan Layanan secara Elektronik	Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan e-Berpadu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana secara berkelanjutan	
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		b. Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		c. Presentase salinan putusan perkara perdata khusus phi yang dikirim ke para Pihak tepat waktu;	95%	100%	105,26%
		d. Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	0%	0%

